

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONTRAK DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Purgito

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui fungsi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu terhadap pekerja kontrak, mengetahui hambatan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak. Di dalam hukum ketenagakerjaan, perjanjian kerja merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja, kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi. Di dalam perjanjian kerja diletakkan segala hak dan kewajiban secara timbal balik antara pengusaha dan pekerja, sehingga kedua belah pihak dalam melaksanakan hubungan kerja telah terikat pada apa yang mereka sepakati dalam perjanjian kerja maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu pemerintah juga mempunyai peranan untuk menangani masalah ketenagakerjaan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban pengusaha maupun pekerja serta untuk menciptakan keadilan sosial di bidang ketenagakerjaan sehingga dapat dicapai hubungan yang harmonis. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif empiris, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif dan wawancara untuk mendapatkan fakta di lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa fungsi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai pedoman perjanjian kerja waktu tertentu di divisi Merchandising PT Arta Boga Cemerlang, namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hambatan dalam pelaksanaannya adalah berasal dari pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan, yaitu pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Kontrak, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

LEGAL PROTECTION FOR CONTRACT WORKERS IN SPECIFIC TIME EMPLOYMENT AGREEMENT UNDER ACT NO. 13 OF 2003 ON EMPLOYMENT

Purgito

Abstract

This study was conducted to determine the function of Act No.13 of 2003 on Employment in the implementation of the specific time employment agreement to contract workers, knowing obstacles of the implementation of the specific time employment agreement under Act No. 13 of 2003 on Employment and to know the government's efforts in providing legal protection against contract workers. In the employment law, labor agreement is a form of protection for labor to ensure the basic rights of workers, equality of opportunity and treatment without discrimination. In employment contracts put all the rights and obligations of reciprocity between employers and workers, so that both sides in implementing the employment relationship has been tied to what they agreed in the employment agreement and legislation in force. Besides, the government also has a role to deal with employment issues through various legislations. It is intended to provide legal certainty to the rights and obligations of employers and employees as well as to create social justice in the field of employment in order to achieve a harmonious relationship. The method used in this thesis is a normative juridical empirical research that refers to the legal norms contained in the legislation applicable as normative footing and interviews to get facts on the ground. The conclusion from this study is that the function of Act No.13 of 2003 on Employment as a guide in the Specific Time Employment Agreement on Merchandising division of PT Arta Boga Cemerlang, but in practice does not run in accordance with Act No.13 of 2003 on Employment. Barriers in implementation is derived from the employers, workers, and government. It is necessary for improvement, which the government should further improve the supervision of the implementation of the Specific Time Employment Agreement Under Act No.13 of 2003 on Employment.

***Keywords* : Legal Protection, Contract workers, Specific Time Employment Agreement.**